



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NANANG SUBANDI
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 223082

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.400.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/56 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 365 m2/130 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 80.405.000

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO HONDA VARIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 13.500.000
4. MOTOR, HONDA BEAT STREET Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
5. MOTOR, YAMAHA XSR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 36.905.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 83.700.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 81.622.979

F. HARTA LAINNYA Rp. 54.796.104

Sub Total Rp. 4.700.524.083

III. HUTANG Rp. 1.607.467.622

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.093.056.461



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.